

Strategi Intervensi Militer Operasi 17 Agustus: Studi Kasus Penumpasan PRRI di Sumatera Barat Periode 1957–1958

Chandra Gantina S¹ Budi Santoso² Heri Abriyadi³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ^{1,2,3}

Email: chandragantina111@gmail.com¹ budi.bodjong@gmail.com² abriyadi90@gmail.com³

Abstract

Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958 merupakan konflik internal yang mengancam stabilitas politik dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk intervensi militer pemerintah Indonesia melalui Operasi 17 Agustus dalam penumpasan PRRI di Sumatera Barat periode 1957–1958 serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan pemerintah mempertahankan intervensi tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki kompetensi dalam sejarah militer dan pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operasi 17 Agustus dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi melalui operasi gabungan antarmatra, dukungan intelijen dan *deception*, serta pengendalian jalur logistik dan aset strategis. Intervensi berhasil melemahkan kekuatan PRRI dan mengembalikan kendali pemerintah pusat, meskipun menimbulkan konsekuensi sosial dan politik.

Keywords: Intervensi Militer, Operasi 17 Agustus, PRRI, Strategi Pertahanan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) merupakan salah satu konflik internal yang berkembang pada periode awal pascakemerdekaan Indonesia dan menjadi tantangan bagi pemerintah pusat dalam mempertahankan stabilitas politik serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemunculan PRRI berkaitan dengan ketegangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang dipengaruhi oleh persoalan distribusi sumber daya, pembangunan, kewenangan pemerintahan, serta kebijakan sentralisasi. Ketegangan tersebut berkembang menjadi konflik bersenjata setelah tuntutan politik dan ketidakpuasan daerah tidak memperoleh penyelesaian yang memadai. PRRI kemudian dideklarasikan pada 15 Februari 1958 dengan basis utama di Sumatera Barat dan melibatkan sejumlah tokoh militer serta politik daerah. Kondisi tersebut mendorong pemerintah pusat untuk menggunakan instrumen militer sebagai bagian dari upaya mengembalikan kendali pemerintahan dan mempertahankan integritas wilayah negara.

Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia merespons PRRI melalui serangkaian operasi militer yang dilaksanakan secara bertahap. Operasi Tegas, Operasi Sadar, dan operasi lainnya menjadi bagian dari rangkaian respons militer sebelum dilaksanakan Operasi 17 Agustus. Operasi tersebut memiliki posisi penting karena melibatkan koordinasi kekuatan darat, laut, dan udara dalam menghadapi kekuatan PRRI di Sumatera Barat. Selain penggunaan kekuatan tempur, pelaksanaan operasi juga berkaitan dengan kegiatan intelijen, *deception*, pengendalian jalur logistik, serta pengamanan aset strategis. Dengan demikian, Operasi 17 Agustus tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan militer di medan pertempuran, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengembalikan otoritas negara di wilayah yang berada dalam pengaruh PRRI.

Kajian mengenai PRRI selama ini lebih banyak menempatkan konflik tersebut dalam perspektif hubungan pusat-daerah, ketidakpuasan politik, dinamika pemerintahan, serta sejarah pemberontakan di Indonesia. Perspektif tersebut penting untuk menjelaskan latar belakang munculnya PRRI, terutama berkaitan dengan persoalan ketimpangan pembangunan, distribusi sumber daya, dan sentralisasi pemerintahan. Pendekatan *greed versus grievance* juga memberikan kerangka untuk memahami konflik melalui dua dimensi, yaitu ketidakpuasan struktural (*grievance*) dan kepentingan material (*greed*). Dalam konteks PRRI, pendekatan tersebut membantu menjelaskan bahwa konflik tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dengan akumulasi ketidakpuasan politik dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Di sisi lain, penelitian mengenai intervensi militer menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata dalam konflik internal dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, keamanan, kelembagaan, dan kepentingan strategis. Mahmood (2016), misalnya, menjelaskan bahwa intervensi militer dapat berkembang ketika institusi politik tidak mampu menjaga stabilitas sehingga militer memperoleh ruang untuk memainkan peran yang lebih besar. Hughes (2015) melalui kajian historisnya menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan intervensi militer berkaitan dengan legitimasi, kepentingan eksternal, dan kemampuan mengendalikan dinamika internal. Sementara itu, Sullivan dan Pizzolo (2020) menunjukkan relevansi perspektif *greed versus grievance* dalam menjelaskan dinamika konflik internal melalui kasus Perang Sipil Libya. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa intervensi militer perlu dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan penggunaan kekuatan tempur.

Penelitian terdahulu mengenai intervensi militer juga telah membahas berbagai kasus di tingkat internasional maupun nasional. Sianipar membahas intervensi militer Perancis dalam konflik internal Mali dan menunjukkan adanya kepentingan keamanan serta strategis yang melatarbelakangi penggunaan kekuatan militer. Fajar dan Nashir mengkaji intervensi Rusia dalam konflik Suriah dan menunjukkan pengaruh intervensi terhadap perubahan tatanan keamanan kawasan. Arif membahas intervensi militer Indonesia di Timor Portugis dengan menekankan pengaruh dukungan eksternal, politik domestik, dan peran pemimpin politik. Rahayu dan Fauzi mengkaji intervensi Arab Saudi terhadap konflik Yaman dengan menunjukkan bahwa kepentingan strategis dan politik kawasan turut memengaruhi keputusan intervensi. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara kepentingan negara, konflik internal, dan penggunaan kekuatan militer.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian mengenai PRRI dan Operasi 17 Agustus. Penelitian terdahulu yang terdapat dalam kajian pustaka tesis lebih banyak membahas intervensi militer dalam kasus negara lain atau membahas PRRI dari perspektif sejarah dan konflik pusat-daerah. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan Operasi 17 Agustus sebagai objek utama analisis strategi intervensi militer pemerintah Indonesia, khususnya dengan menghubungkan bentuk operasi gabungan, penggunaan intelijen dan *deception*, pemutusan jalur logistik, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan pemerintah untuk mempertahankan intervensi. Tesis ini secara eksplisit mengidentifikasi keterbatasan kajian sebelumnya yang belum membahas Operasi 17 Agustus secara khusus dalam perspektif pertahanan negara.

Kesenjangan tersebut penting karena Operasi 17 Agustus memiliki karakteristik yang berbeda dari sekadar operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata. Operasi tersebut memperlihatkan adanya keterpaduan antara strategi militer, keputusan politik, intelijen, pengendalian wilayah, dan pengamanan kepentingan strategis. Dalam pelaksanaannya, operasi melibatkan unsur darat, laut, dan udara serta diarahkan untuk melemahkan pusat kekuatan

PRRI di Sumatera Barat. Penggunaan *deception* dan operasi intelijen dilakukan untuk memengaruhi persepsi serta respons pihak PRRI, sementara pemutusan jalur logistik dan pengamanan aset strategis diarahkan untuk mengurangi kemampuan operasional kelompok pemberontak.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan Ilmu Pertahanan sebagai *grand theory* untuk memahami upaya negara dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah. Teori Intervensi Militer dan Konsep Keamanan Nasional digunakan sebagai *middle theory* untuk menjelaskan penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas dan integritas negara. Selanjutnya, *Greed versus Grievance Theory* digunakan untuk memahami faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik PRRI, sedangkan Teori Operasi Militer digunakan untuk menganalisis strategi dan pelaksanaan Operasi 17 Agustus. Kerangka teoritis tersebut memungkinkan penelitian menghubungkan faktor penyebab konflik, keputusan pemerintah menggunakan kekuatan militer, kepentingan keamanan nasional, dan pelaksanaan operasi di lapangan.

Perspektif Teori Operasi Militer menjadi penting karena Operasi 17 Agustus menunjukkan adanya keterpaduan berbagai unsur dalam mencapai tujuan strategis. Konsep *operational art* dan *operational design* menempatkan tujuan, cara, sarana, pusat gravitasi, garis operasi, serta kondisi akhir sebagai unsur yang perlu dihubungkan dalam perencanaan operasi. Dalam penelitian ini, konsep tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia mengorganisasikan kekuatan militer dan berbagai instrumen pendukung untuk melemahkan kemampuan PRRI serta mengembalikan kendali pemerintah pusat. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan kronologi operasi, tetapi juga menganalisis hubungan antara strategi, taktik, sumber daya, dan tujuan politik yang ingin dicapai.

Selain aspek operasional, keputusan pemerintah mempertahankan intervensi juga perlu dipahami melalui faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ancaman terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, stabilitas politik, kepentingan ekonomi, serta kebutuhan konsolidasi kekuatan pemerintah pusat. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan keterlibatan aktor asing dan dinamika geopolitik Perang Dingin yang memengaruhi persepsi pemerintah terhadap PRRI. Dengan demikian, keputusan penggunaan kekuatan militer tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara kondisi domestik dan lingkungan strategis eksternal. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan antara PRRI, dukungan eksternal, dan dinamika geopolitik pada periode tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis strategi Operasi 17 Agustus dengan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan intervensi militer terhadap PRRI. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan intervensi militer sebagai fenomena politik, keamanan, atau geopolitik dalam kasus tertentu, penelitian ini memusatkan perhatian pada satu operasi militer Indonesia dalam konteks konflik domestik serta menganalisisnya melalui perspektif pertahanan negara. Fokus tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan hubungan antara strategi operasi gabungan, intelijen, *deception*, pengendalian logistik, keputusan politik, dan kepentingan mempertahankan keutuhan wilayah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi dalam memperluas kajian sejarah militer dan strategi pertahanan Indonesia, khususnya mengenai penggunaan kekuatan militer dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain deskriptif-analitis dan pendekatan *literature review*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi intervensi militer pemerintah Republik Indonesia dalam penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) melalui Operasi 17 Agustus di Sumatera Barat periode 1957–1958. Pendekatan *literature review* digunakan untuk menelaah berbagai sumber tertulis berupa buku, dokumen sejarah, arsip, laporan operasi, jurnal akademik, dan publikasi digital yang berkaitan dengan PRRI dan Operasi 17 Agustus. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan konteks historis, strategi operasi, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keputusan pemerintah Indonesia dalam mempertahankan intervensi militer.

Penelitian dilaksanakan pada periode Maret 2025 sampai Juli 2026. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan kebutuhan memperoleh data dan informasi yang relevan dengan objek penelitian, meliputi sumber dokumentasi dan arsip serta lokasi wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan mengenai PRRI dan Operasi 17 Agustus. Dalam penelitian ini, objek kajian adalah strategi intervensi militer pemerintah Indonesia melalui Operasi 17 Agustus dalam penumpasan PRRI di Sumatera Barat periode 1957–1958. Sumber data terdiri atas sumber tertulis dan narasumber yang relevan dengan fokus penelitian.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Research Result

Penelitian mengenai Strategi Intervensi Militer Operasi 17 Agustus dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap tiga informan yang memiliki kompetensi dalam sejarah militer dan dokumentasi pertahanan. Hasil pengumpulan data menunjukkan adanya kesamaan informasi mengenai tahapan operasi, keterlibatan antarmatra, penggunaan intelijen dan *deception*, pengamanan jalur logistik serta aset strategis, dan faktor yang melatarbelakangi pemerintah mempertahankan intervensi militer terhadap PRRI.

Bentuk Intervensi Militer melalui Operasi 17 Agustus

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi militer pemerintah Republik Indonesia terhadap PRRI berlangsung secara bertahap. Operasi Tegas digunakan sebagai tahap awal untuk pengumpulan informasi dan konsolidasi pasukan. Operasi Sadar kemudian dilaksanakan untuk menekan posisi PRRI di wilayah Riau. Tahap berikutnya adalah Operasi 17 Agustus yang menjadi serangan utama dengan pengerahan kekuatan militer dalam skala yang lebih besar. Koordinasi operasi dilakukan lintas komando dengan pusat kendali berada di bawah Kolonel Ahmad Yani. Operasi 17 Agustus melibatkan tiga matra. TNI AD menjalankan serangan darat dan penguasaan wilayah, TNI AL mendukung pengamanan pendaratan dan jalur laut, sedangkan AURI memberikan dukungan udara, termasuk bombardemen dan suplai udara. Keterlibatan ketiga matra tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi dalam satu rangkaian operasi. Penguasaan wilayah Padang menjadi salah satu sasaran strategis karena berkaitan dengan pusat kekuatan dan komando PRRI.

Selain pengerahan kekuatan antarmatra, hasil penelitian menunjukkan adanya penggunaan strategi intelijen dan *deception*. Informasi palsu digunakan untuk memengaruhi persepsi dan respons pihak PRRI terhadap rencana operasi. Kegiatan intelijen juga dilakukan melalui pengumpulan informasi dan pemetaan posisi lawan sebelum serangan utama dilaksanakan. Intervensi juga mencakup pengendalian jalur logistik dan pengamanan objek strategis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengamanan kawasan Caltex dan pelabuhan Dumai dilakukan sebelum pelaksanaan operasi utama di Padang. Pengamanan tersebut

berkaitan dengan upaya mempertahankan aset ekonomi dan infrastruktur yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung kegiatan pemerintah maupun operasi militer. Berdasarkan hasil coding wawancara, bentuk intervensi militer yang ditemukan dalam penelitian dapat dirangkum sebagai berikut.

Table 1. Bentuk Intervensi Militer Pemerintah RI melalui Operasi 17 Agustus

No	Bentuk Intervensi	Hasil Penelitian
1	Operasi gabungan antarmatra	Melibatkan TNI AD, TNI AL, dan AURI dengan pembagian fungsi dalam serangan darat, pengamanan laut, pendaratan, bombardemen, dan dukungan udara
2	Operasi intelijen dan <i>deception</i>	Pengumpulan informasi, pemetaan posisi PRRI, penyebaran informasi palsu, dan pengelabuan arah serangan
3	Intervensi logistik dan ekonomi	Pemutusan jalur logistik serta pengamanan objek vital seperti kawasan Caltex dan pelabuhan
4	Operasi bertahap	Operasi Tegas dan Operasi Sadar menjadi tahapan sebelum Operasi 17 Agustus sebagai serangan utama
5	Intervensi politik dan diplomatik	Terdapat upaya mempertahankan legitimasi pemerintah pusat dan mengurangi kemungkinan keterlibatan atau intervensi asing

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa operasi menghasilkan perubahan terhadap kemampuan PRRI. Struktur komando PRRI mengalami pelemahan, jalur logistik terputus, dan kendali pemerintah pusat kembali terbentuk di wilayah yang sebelumnya dikuasai pemberontak. Operasi tersebut juga tercatat sebagai pengalaman penting dalam pelaksanaan operasi gabungan antarmatra di Indonesia.

Faktor Internal dan Eksternal dalam Mempertahankan Intervensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pemerintah untuk mempertahankan intervensi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ancaman terhadap integritas wilayah, krisis legitimasi pemerintah, ketegangan hubungan pusat-daerah, perlindungan aset strategis, serta konsolidasi kekuatan militer. Faktor eksternal meliputi dinamika Perang Dingin, keterlibatan atau dukungan pihak asing terhadap PRRI, pertimbangan citra Indonesia di lingkungan internasional, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Table 2. Faktor yang Memengaruhi Keputusan Pemerintah Mempertahankan Intervensi

No	Faktor	Temuan Penelitian
1	Integritas dan kedaulatan negara	PRRI dipandang memiliki struktur komando dan dukungan yang dapat mengancam integrasi wilayah
2	Legitimasi pemerintah	Pemerintah menghadapi instabilitas politik dan kekhawatiran munculnya gerakan serupa di daerah lain
3	Ketegangan pusat-daerah	Ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat berkembang menjadi konflik bersenjata
4	Aset strategis	Kawasan minyak Caltex dan pelabuhan memiliki nilai strategis bagi ekonomi dan keamanan
5	Konsolidasi militer	Operasi menjadi bagian dari penguatan kemampuan dan koordinasi TNI
6	Perang Dingin	Konflik domestik berlangsung dalam lingkungan geopolitik yang melibatkan persaingan kekuatan global
7	Dukungan asing	Pemerintah memperhatikan kemungkinan keterlibatan dan dukungan pihak asing terhadap PRRI
8	Citra internasional	Operasi berkaitan dengan upaya menunjukkan kemampuan pemerintah mempertahankan wilayahnya sendiri
9	Stabilitas kawasan	Pemerintah mempertimbangkan potensi perluasan konflik dan dampaknya terhadap Asia Tenggara

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi militer pemerintah Republik Indonesia melalui Operasi 17 Agustus dilaksanakan secara bertahap dan multidimensi. Operasi Tegas dan Operasi Sadar menjadi tahapan awal sebelum Operasi 17 Agustus sebagai operasi utama. Pelaksanaannya melibatkan TNI AD, TNI AL, dan AURI serta didukung oleh kegiatan intelijen, *deception*, pengendalian jalur logistik, dan pengamanan aset strategis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa intervensi pemerintah tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur, tetapi mengintegrasikan berbagai instrumen untuk melemahkan kemampuan PRRI. Keterpaduan antarmatra menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan operasi. TNI AD berperan dalam operasi darat, TNI AL mendukung pendaratan dan pengamanan jalur laut, sedangkan AURI memberikan dukungan udara. Penggunaan intelijen dan *deception* dilakukan melalui pengumpulan informasi, pemetaan posisi PRRI, serta penyebaran informasi yang menyesatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasi berkaitan dengan kemampuan mengintegrasikan kekuatan tempur dengan informasi dan pengelolaan medan operasi.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep teori operasi militer yang menekankan pentingnya integrasi kekuatan dan *unity of effort*. Operasi Tegas dan Operasi Sadar menyediakan tahapan persiapan sebelum serangan utama sehingga Operasi 17 Agustus dapat dilaksanakan dengan informasi dan koordinasi yang lebih terarah. Dengan demikian, bentuk intervensi yang ditemukan dalam penelitian memperlihatkan hubungan antara perencanaan operasi, intelijen, kekuatan antarmatra, dan pencapaian tujuan strategis. Dari sisi faktor yang memengaruhi keberlanjutan intervensi, penelitian menemukan faktor internal berupa ancaman terhadap integritas wilayah, krisis legitimasi pemerintah, ketegangan pusat-daerah, perlindungan aset strategis, dan konsolidasi militer. Sementara itu, faktor eksternal meliputi konteks Perang Dingin, dugaan keterlibatan pihak asing, kepentingan mempertahankan citra Indonesia, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mempertahankan operasi.

Temuan mengenai faktor internal juga memperlihatkan kesesuaian dengan perspektif *Greed versus Grievance*. Ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan ekonomi dan politik pemerintah pusat (*grievance*) berinteraksi dengan keberadaan sumber daya strategis seperti minyak (*greed*). Kondisi tersebut meningkatkan nilai strategis wilayah konflik dan memperkuat kepentingan pemerintah untuk mempertahankan kendali atas wilayah serta aset strategis. Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menempatkan intervensi militer sebagai tindakan yang dipengaruhi oleh kepentingan keamanan, politik, dan lingkungan strategis. Namun, penelitian ini memberikan perbedaan dengan memusatkan analisis pada Operasi 17 Agustus sebagai operasi gabungan dalam konflik internal Indonesia, serta menghubungkan strategi operasi dengan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pemerintah mempertahankan intervensi. Dengan demikian, kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian perspektif strategi operasi militer, keamanan nasional, dan *Greed versus Grievance* dalam menjelaskan penumpasan PRRI. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman Operasi 17 Agustus memberikan pembelajaran mengenai pentingnya integrasi antarmatra, intelijen, pengendalian logistik, pengamanan aset strategis, serta keterkaitan antara keputusan politik dan pelaksanaan operasi militer. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan teori intervensi militer dan operasi militer dalam konteks konflik internal Indonesia, khususnya dalam mempertahankan integritas wilayah dan stabilitas nasional.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi militer pemerintah Republik Indonesia melalui Operasi 17 Agustus dalam penumpasan PRRI di Sumatera Barat dilaksanakan secara bertahap melalui operasi gabungan yang melibatkan TNI AD, TNI AL, dan AURI, serta didukung oleh strategi intelijen, *deception*, pengendalian jalur logistik, dan pengamanan aset strategis. Pelaksanaan operasi tersebut berhasil melemahkan kekuatan PRRI dan mengembalikan kendali pemerintah pusat terhadap wilayah strategis. Keputusan pemerintah untuk mempertahankan intervensi dipengaruhi oleh faktor internal berupa ancaman terhadap integritas wilayah, legitimasi pemerintah, ketegangan pusat-daerah, perlindungan aset strategis, dan konsolidasi militer, serta faktor eksternal berupa dinamika Perang Dingin, potensi keterlibatan pihak asing, citra internasional, dan stabilitas kawasan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada keterbatasan akses terhadap sebagian dokumen dan arsip primer mengenai pelaksanaan operasi pada periode 1957–1958, sehingga beberapa temuan masih bergantung pada dokumentasi yang tersedia dan keterangan informan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas penggunaan arsip primer, dokumen militer, serta sumber dari pihak yang terlibat langsung dalam PRRI untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Operasi 17 Agustus. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pertahanan RI, para informan, serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, informasi, dan bantuan selama proses penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

BIBLIOGRAPHY

- Apandi, A., Cahyani, A. R., Sari, F. R., & S, R. L. (2025). Dinamika politik dan militer di Indonesia dalam konteks pemberontakan dan peralihan kekuasaan (1946–1965). *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 3(1).
- Budiman, M., & Jufri, M. J. (2026). PRRI dalam bingkai nasionalisme: Jejak Reuni Divisi Banteng dan tuntutan otonomi. *YASIN*, 6(1), 499–510. <https://doi.org/10.58578/yasin.v6i1.8882>
- Dayani, S. R., Rohayati, T., & Sujana, A. M. (2025). Pemberontakan PRRI dan Permesta: Ketegangan politik di awal Orde Lama (1957–1958). *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Fogg, K. W. (2016). Evaluating the PRRI rebellion as a West Sumatran peasant movement. *Tingkap*, 11(2), 160–174. <https://doi.org/10.24036/tingkap.v11i2.6203>
- Hughes, M. (2015). Military intervention and political order in post-conflict states. *International Affairs*, 91(4), 789–806.
- Kem, J. B. (2021). *Planning for military operations: Operational art and design*. U.S. Army Command and General Staff College.
- Pratama, R. A., Maskun, M., & Arif, S. (2023). Emergency government of Lampung residency during Kraai Operation, 1949–1950. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(1). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i1.31858>
- Pratiwi, S. E. (2016). Pembubaran partai politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Rante Lembang, A. (2020). What are the forms of crimes against the Unitary State of the Republic of Indonesia? A book review *Kejahatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2(2), 291–296. <https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.34782>
- Sarilan. (2020). The negation of PRRI in high school history textbooks. *Journal of History Education and Religious Studies*, 1(1).
- Siregar, I. F. (2010). Pasang surut peran politik Masyumi dalam pemerintahan (1945–1960). *Forum Ilmu Sosial*, 35(1).

- Suhirwan. (2023). Sumber daya strategis dan pertahanan negara dalam perspektif keamanan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 13(1).
- Sullivan, C., & Pizzolo, P. (2020). Greed and grievance in civil conflict: Evidence from Libya. *Civil Wars*, 22(3), 1–24.
- Taylor, J. G. (2003). *Indonesia: Peoples and histories*. Yale University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.